

Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko terhadap Pencegahan Fraud pada Organisasi Perangkat Daerah Labuhanbatu

Nur'aiun Gulo ^{a,1,*}, Hayanuddin Safri ^{b,2}, Aldi Suhendra Hasibuan ^{c,3}

^{a,b,c} Universitas Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja No. 126-A Km 3,5 Aek Tapa-Rantauprapat, Rantauprapat - 21418, Indonesia

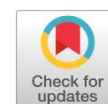
¹ Nurainungulo7@gmail.com *; ² hayanuddinhrp@gmail.com; ³ aldisuhendra2022@gmail.com

* Penulis Korespondensi

Diterima 02 April 2026; Direvisi 08 April 2026; Diterima April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko terhadap pencegahan fraud pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori. Populasi penelitian adalah aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan pada OPD Kabupaten Labuhanbatu. Sampel penelitian sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, serta manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Secara simultan, audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,735 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 73,5% variasi pencegahan fraud, sedangkan 26,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola, pengawasan internal, dan sistem manajemen risiko untuk menciptakan organisasi publik yang transparan dan akuntabel.

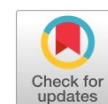


KATA KUNCI

Audit Internal;
Pengendalian Internal;
Manajemen Risiko;
Pencegahan Fraud;
Organisasi Perangkat Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of internal audit, internal control, and risk management on fraud prevention in Regional Government Organizations (OPD) of Labuhanbatu Regency. This research employed a quantitative approach using an explanatory research method. The population consisted of government employees involved in financial management and supervision within OPDs in Labuhanbatu Regency. A total of 100 respondents were selected using a purposive sampling technique. Data was collected through questionnaires using a Likert scale and analyzed using multiple linear regression with the assistance of IBM SPSS Statistics 27. The results indicate that internal audits have a positive and significant effect on fraud prevention, internal control has a positive and significant effect on fraud prevention, and risk management has a positive and significant effect on fraud prevention. Simultaneously, internal audit, internal control, and risk management have a significant effect on fraud prevention. The coefficient of determination (R^2) of 0.735 indicates that the independent variables explain 73.5% of the variation in fraud prevention, while the remaining 26.5% is influenced by other factors outside the research model. This study provides practical implications for local governments in strengthening governance, internal supervision, and risk management systems to establish transparent, accountable, and fraud-resistant public organizations.



KEYWORD

Internal Audit;
Internal Control;
Risk Management;
Fraud Prevention;
Regional Government Organizations



This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

1. Pendahuluan

Fraud atau kecurangan merupakan salah satu permasalahan utama dalam tata kelola sektor publik yang berdampak pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana pengelolaan anggaran pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap penggunaan sumber daya publik dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel [1]. Namun

demikian, kompleksitas pengelolaan keuangan daerah masih membuka peluang terjadinya berbagai bentuk fraud, seperti penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur, penyalahgunaan wewenang, serta tindak korupsi [2]. Kondisi tersebut menjadikan upaya pencegahan fraud sebagai salah satu prioritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut Institute of Internal Auditors (IIA, 2024), audit internal merupakan aktivitas independen dan objektif yang memberikan jasa assurance dan konsultasi untuk meningkatkan nilai organisasi melalui evaluasi efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola. Sementara itu, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2017) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya terkait efektivitas operasional, keandalan pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Di sisi lain, ISO 31000:2018 menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian sehingga berbagai potensi risiko, termasuk risiko fraud, dapat diminimalkan.

Fenomena fraud pada sektor pemerintahan masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Berbagai kasus penyimpangan pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa lemahnya fungsi audit internal, kurang efektifnya sistem pengendalian internal, serta belum optimalnya penerapan manajemen risiko menjadi faktor yang meningkatkan peluang terjadinya fraud. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah [3]. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Labuhanbatu. Sebagai salah satu pemerintah daerah yang mengelola anggaran pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program strategis daerah, OPD Kabupaten Labuhanbatu dituntut memiliki sistem pengawasan yang efektif agar potensi fraud dapat diminimalkan. Penguatan fungsi audit internal melalui Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya auditor internal, belum optimalnya budaya pengendalian, rendahnya kesadaran manajemen terhadap manajemen risiko, dan kompleksitas pengelolaan anggaran yang dapat meningkatkan risiko terjadinya fraud [4].

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2024), fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization), kemampuan (capability), dan arogansi (arrogance). Dari kelima faktor tersebut, peluang merupakan faktor yang paling dapat diminimalkan melalui penguatan audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Semakin efektif ketiga mekanisme tersebut diterapkan, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan dalam organisasi. Audit internal memiliki peran strategis dalam memberikan keyakinan atas efektivitas pengendalian, mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan, mengidentifikasi kelemahan sistem, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Pengendalian internal yang efektif akan mempersempit peluang terjadinya penyimpangan melalui pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, dokumentasi yang memadai, pengamanan aset, serta kegiatan pemantauan. Sementara itu, manajemen risiko memungkinkan organisasi mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko fraud [5].

Dari perspektif akademik, penelitian mengenai audit internal, pengendalian internal, dan pencegahan fraud telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian hanya menguji hubungan antara audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud, sedangkan integrasi manajemen risiko sebagai variabel independen masih relatif terbatas. Selain itu, objek penelitian umumnya berfokus pada sektor swasta, perbankan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga kajian pada Organisasi Perangkat Daerah masih memerlukan penguatan empiris.

Penelitian [6] menemukan bahwa auditor internal, pengendalian internal, dan penerapan Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada sektor perbankan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal yang efektif mampu menekan peluang terjadinya penyimpangan. Namun, penelitian tersebut dilakukan pada sektor perbankan sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi pada organisasi sektor publik yang memiliki karakteristik tata kelola berbeda. Selanjutnya, penelitian [7] menunjukkan bahwa kualitas audit internal dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada perusahaan di Labuhanbatu Selatan. Meskipun memberikan bukti empiris mengenai pentingnya fungsi pengawasan internal, penelitian tersebut dilakukan pada sektor swasta sehingga belum menggambarkan kondisi Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki mekanisme pengawasan dan regulasi yang berbeda.

Kajian literatur oleh [8] menyimpulkan bahwa audit internal dan pengendalian internal memiliki hubungan positif terhadap pencegahan fraud pada sektor publik di Indonesia. Namun, penelitian tersebut menggunakan pendekatan literature review sehingga belum memberikan bukti empiris secara langsung mengenai pengaruh kedua variabel tersebut pada instansi pemerintah daerah tertentu. Demikian pula, [9] melalui kajian sistematis menegaskan bahwa audit internal dan sistem pengendalian internal merupakan mekanisme utama dalam membangun sistem pencegahan fraud yang efektif, tetapi masih diperlukan penelitian lapangan untuk menguji implementasinya pada organisasi pemerintah.

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menguji pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud, sedangkan manajemen risiko masih jarang diintegrasikan sebagai variabel yang memengaruhi efektivitas pencegahan fraud. Kedua, mayoritas penelitian dilakukan pada sektor swasta, perbankan, atau menggunakan metode systematic literature review, sehingga bukti empiris pada Organisasi Perangkat Daerah masih terbatas. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara khusus menguji pengaruh audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko secara simultan terhadap pencegahan fraud pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Dengan demikian, penelitian ini terletak pada pengembangan model empiris yang mengintegrasikan audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko sebagai determinan pencegahan fraud pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menguji ketiga variabel tersebut secara simultan pada sektor publik daerah, sehingga dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik, memperluas implementasi teori Fraud Triangle/Fraud Pentagon, COSO Internal Control Framework, dan Enterprise Risk Management (ERM), serta memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, khususnya Inspektorat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari fraud.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Audit Internal

Audit internal merupakan fungsi independen yang memberikan keyakinan (assurance) dan jasa konsultasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Pada sektor publik, audit internal berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya fraud. Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) (2024), audit internal merupakan aktivitas assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan operasi organisasi melalui pendekatan sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

[10] menyatakan bahwa audit internal memiliki peranan strategis dalam mencegah dan mendeteksi fraud melalui pelaksanaan audit berbasis risiko, evaluasi efektivitas pengendalian, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada manajemen. [11] menjelaskan bahwa kualitas audit internal ditentukan oleh independensi auditor, kompetensi profesional, dan kepatuhan terhadap standar audit. Ketiga aspek tersebut terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko fraud dalam organisasi. [5] mengemukakan bahwa audit internal berkontribusi dalam memperkuat seluruh komponen pengendalian internal COSO sehingga mampu meningkatkan efektivitas pencegahan fraud dan kualitas tata kelola organisasi.

2.2 Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang oleh pimpinan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, patuh terhadap peraturan, serta menghasilkan laporan yang andal. [12] menjelaskan bahwa pengendalian internal yang efektif meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan yang saling terintegrasi. [4] menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap peningkatan tata kelola sektor publik melalui penurunan peluang terjadinya fraud serta peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah.

2.3 Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, serta memantau risiko agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. [13] Manajemen risiko adalah upaya mengelola risiko secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam system yang

baik untuk mencegah kejadian yang tidak terduga.. Menurut [14], Manajemen risiko adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola risiko agar organisasi pemerintah dapat mencapai tujuan strategisnya.

2.4 Pencegahan Fraud

Pencegahan fraud merupakan seluruh upaya yang dilakukan organisasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan melalui penguatan sistem pengendalian, budaya etika, audit internal, dan manajemen Risiko. [15] menyatakan bahwa audit internal berperan penting dalam mengurangi risiko fraud melalui evaluasi pengendalian, deteksi dini penyimpangan, dan pemberian rekomendasi perbaikan. [11] menemukan bahwa audit internal yang efektif meningkatkan pengendalian internal dan pencegahan fraud sehingga berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research untuk menganalisis pengaruh audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko terhadap pencegahan fraud pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Labuhanbatu. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan kausal antarvariabel melalui analisis statistik sehingga mampu memberikan bukti empiris terhadap hipotesis yang diajukan [16].

Penelitian dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Populasi penelitian meliputi seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja pada OPD, khususnya pejabat struktural, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara pengeluaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), auditor internal Inspektorat, serta pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden memiliki masa kerja minimal dua tahun, memahami sistem pengendalian internal, serta terlibat dalam pengelolaan keuangan atau pengawasan internal. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Cochran untuk populasi yang tidak diketahui sehingga diperoleh sebanyak 100 responden.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan pemerintah daerah, dokumen Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu, regulasi terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta berbagai artikel ilmiah dan buku yang relevan.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas audit internal (X_1), pengendalian internal (X_2), dan manajemen risiko (X_3), sedangkan variabel dependen adalah pencegahan fraud (Y). Audit internal diukur melalui indikator independensi, kompetensi auditor, objektivitas, pelaksanaan audit, evaluasi pengendalian, dan tindak lanjut hasil audit berdasarkan Global Internal Audit Standards dari Institute of Internal Auditors (IIA, 2024). Pengendalian internal diukur menggunakan lima komponen COSO (2017), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Manajemen risiko diukur berdasarkan kerangka ISO 31000:2018, meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, komunikasi, dan pemantauan risiko. Adapun pencegahan fraud diukur berdasarkan indikator Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2024) yang meliputi budaya etika, efektivitas pengendalian, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), pengawasan, penegakan sanksi, dan pelatihan anti-fraud.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas menggunakan Pearson Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai minimum 0,70. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas berdasarkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, serta uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser.

Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27. Analisis meliputi statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R^2). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

dengan Y adalah pencegahan fraud, X_1 audit internal, X_2 pengendalian internal, X_3 manajemen risiko, α konstanta, β_1 , β_2 , dan β_3 merupakan koefisien regresi, serta ϵ adalah galat penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil

dari 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Penelitian ini melibatkan 100 responden yang berasal dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu. Responden merupakan pegawai yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan, serta fungsi pengawasan internal.

Table 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	57	57
	Perempuan	43	43
Pendidikan	SMA/Sederajat	12	12
	Diploma/S1	68	68
	S2	20	20
Masa Kerja	2–5 Tahun	24	24
	6–10 Tahun	38	38
	>10 Tahun	38	38
Jabatan	Bendahara/Pengelola Keuangan	31	31
	PPTK/PPK	29	29
	Pejabat Struktural	25	25
	Auditor/Pengawasan Internal	15	15

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan karakteristik responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun dan terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah, sehingga dianggap mampu memberikan informasi yang relevan terkait penerapan audit internal, pengendalian internal, manajemen risiko, dan pencegahan fraud.

Table 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach Alpha	Standar	Keterangan
Audit Internal (X1)	0,912	>0,70	Reliabel
Pengendalian Internal (X2)	0,925	>0,70	Reliabel
Manajemen Risiko (X3)	0,918	>0,70	Reliabel
Pencegahan Fraud (Y)	0,934	>0,70	Reliabel

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan mampu menghasilkan pengukuran yang konsisten.

Table 3. Hasil Uji Normalitas

Metode	Asymp. Sig.	Kriteria	Kesimpulan
Kolmogorov-Smirnov	0,200	>0,05	Normal

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga data penelitian dinyatakan berdistribusi normal.

Table 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Audit Internal	0,421	2,375	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengendalian Internal	0,389	2,571	Tidak terjadi multikolinearitas
Manajemen Risiko	0,456	2,193	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Nilai tolerance seluruh variabel berada di atas 0,10 dan nilai VIF berada di bawah 10, sehingga model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas.

Table 5. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t Hitung	Sig.
Konstanta	4,215	-	-
Audit Internal (X1)	0,286	3,742	0,000
Pengendalian Internal (X2)	0,341	4,856	0,000
Manajemen Risiko (X3)	0,298	4,113	0,000

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh persamaan regresi:

$$Y = 4,215 + 0,286X_1 + 0,341X_2 + 0,298X_3 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki arah hubungan positif terhadap pencegahan fraud. Artinya, semakin baik audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko, maka semakin meningkat efektivitas pencegahan fraud pada OPD Kabupaten Labuhanbatu.

Table 6. Hasil Uji Parsial (t)

Hipotesis	Variabel	t Hitung	Sig.	Keputusan
H1	Audit Internal → Pencegahan Fraud	3,742	0,000	Diterima
H2	Pengendalian Internal → Pencegahan Fraud	4,856	0,000	Diterima
H3	Manajemen Risiko → Pencegahan Fraud	4,113	0,000	Diterima

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas mekanisme pengawasan dan pengelolaan risiko mampu memperkecil peluang terjadinya tindakan fraud pada organisasi pemerintah daerah.

Table 7. Hasil Uji F

Model	F Hitung	Sig.
Regresi	86,472	0,000

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada OPD Kabupaten Labuhanbatu.

Table 8. Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,857	0,735	0,727

Sumber: Output SPSS diolah, 2026.

Nilai R Square sebesar 0,735 menunjukkan bahwa variabel audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko mampu menjelaskan 73,5% variasi pencegahan fraud pada OPD Kabupaten Labuhanbatu. Sementara itu, sebesar 26,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti budaya organisasi, kompetensi aparatur, whistleblowing system, moralitas individu, dan komitmen organisasi.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,286. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin efektif pelaksanaan audit internal, maka semakin meningkat kemampuan organisasi dalam mencegah terjadinya fraud.

Audit internal memiliki peran penting sebagai mekanisme pengawasan yang memberikan evaluasi independen terhadap efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan audit internal melalui fungsi pengawasan Inspektorat Daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran,

pelaksanaan program, dan aktivitas administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit internal tidak hanya berfungsi menemukan kesalahan setelah terjadi, tetapi juga berperan sebagai mekanisme preventif melalui identifikasi kelemahan sistem, pemberian rekomendasi perbaikan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan [12] yang menjelaskan bahwa diperlukan mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara pihak yang diberikan mandat (agent) dengan pihak yang memberikan mandat (principal). Dalam organisasi sektor publik, audit internal menjadi salah satu mekanisme pengendalian yang dapat mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah dalam mengelola sumber daya publik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian [6] yang menemukan bahwa efektivitas audit internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa auditor internal yang kompeten, independen, dan objektif mampu mengidentifikasi kelemahan pengendalian serta memberikan rekomendasi yang dapat mengurangi risiko kecurangan. Sejalan dengan itu, penelitian [6] menunjukkan bahwa penguatan fungsi audit internal merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan tata kelola organisasi publik dan menekan potensi fraud.

Selain itu, penelitian [7] juga menyatakan bahwa kualitas audit internal berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pencegahan fraud karena audit internal mampu menciptakan sistem monitoring yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa peningkatan kualitas audit internal pada OPD Kabupaten Labuhanbatu menjadi faktor penting dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini terlihat dari nilai uji t sebesar 4,856 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,341. Artinya, semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi tingkat efektivitas pencegahan fraud pada OPD Kabupaten Labuhanbatu. Pengendalian internal merupakan komponen utama dalam menciptakan sistem organisasi yang mampu mencegah dan mendeteksi tindakan penyimpangan. Berdasarkan kerangka COSO (2017), pengendalian internal terdiri atas lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Implementasi kelima komponen tersebut dapat membatasi peluang terjadinya fraud melalui mekanisme otorisasi, pemisahan tugas, pengawasan transaksi, serta evaluasi secara berkala.

Sistem pengendalian internal yang kuat dapat memperkecil kesempatan tersebut dengan menciptakan prosedur kerja yang jelas, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [7] yang menemukan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada organisasi sektor publik. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu faktor utama munculnya penyimpangan karena memberikan ruang bagi individu untuk melakukan tindakan yang merugikan organisasi.

Selanjutnya, penelitian [8] menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mengurangi risiko fraud. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa pengendalian internal menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bebas dari penyimpangan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 0,298. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko, maka semakin efektif upaya pencegahan fraud yang dilakukan organisasi.

Manajemen risiko memiliki peran strategis dalam membantu organisasi mengenali potensi ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan, termasuk risiko penyalahgunaan kewenangan, manipulasi informasi, dan penyimpangan pengelolaan keuangan. Melalui penerapan manajemen risiko, organisasi dapat menyusun strategi mitigasi sebelum risiko tersebut berkembang menjadi tindakan fraud. Menurut ISO 31000:2018, manajemen risiko merupakan proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Dalam sektor pemerintahan, penerapan manajemen risiko memungkinkan OPD melakukan pemetaan area yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian [12] yang menemukan bahwa penerapan manajemen risiko berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas pencegahan fraud. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki sistem pengelolaan risiko yang baik akan lebih mampu mendeteksi potensi

penyimpangan sejak awal. Selain itu, penelitian [11] menunjukkan bahwa integrasi manajemen risiko dengan sistem pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas tata kelola organisasi publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko operasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mencegah terjadinya fraud.

Berdasarkan hasil uji simultan (*uji F*) menunjukkan bahwa audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,735 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan sebesar 73,5% variasi pencegahan fraud. Hasil ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud tidak dapat dilakukan hanya melalui satu mekanisme pengawasan, tetapi membutuhkan kombinasi antara fungsi audit internal, sistem pengendalian internal yang kuat, dan manajemen risiko yang terstruktur. Audit internal berperan sebagai fungsi evaluasi dan pengawasan, pengendalian internal berfungsi membangun mekanisme pencegahan melalui prosedur organisasi, sedangkan manajemen risiko membantu organisasi mengidentifikasi serta mengantisipasi potensi penyimpangan.

Temuan ini memperkuat konsep Fraud Pentagon Theory yang menjelaskan bahwa fraud dapat terjadi apabila terdapat kesempatan yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan penyimpangan. Dengan memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola organisasi, peluang tersebut dapat diminimalkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [5] yang menyatakan bahwa kombinasi pengendalian internal, audit internal, dan manajemen risiko merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan fraud pada sektor publik. Penelitian tersebut menegaskan bahwa organisasi dengan sistem tata kelola yang matang memiliki kemampuan lebih baik dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons risiko kecurangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa peningkatan kualitas audit internal, penguatan sistem pengendalian internal, dan penerapan manajemen risiko yang efektif merupakan strategi penting bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari fraud.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko terhadap pencegahan fraud pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan fraud pada organisasi sektor publik. Pertama, audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan audit internal yang ditunjukkan melalui independensi auditor, kompetensi, objektivitas, evaluasi pengendalian, serta tindak lanjut hasil audit, maka semakin kuat kemampuan organisasi dalam mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan.

Kedua, pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif melalui lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan mampu mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian internal yang kuat menjadi salah satu mekanisme utama dalam membatasi faktor kesempatan (*opportunity*) yang menjadi penyebab terjadinya fraud.

Ketiga, manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian membuktikan bahwa kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dapat meningkatkan kesiapan OPD dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan. Penerapan manajemen risiko yang baik memungkinkan organisasi melakukan tindakan preventif sebelum risiko berkembang menjadi tindakan fraud. Keempat, secara simultan audit internal, pengendalian internal, dan manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Hasil ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud membutuhkan pendekatan yang terintegrasi melalui penguatan fungsi pengawasan internal, penerapan sistem pengendalian yang efektif, dan pengelolaan risiko yang sistematis.

5.2 Saran

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu terus memperkuat sistem pencegahan fraud melalui peningkatan kualitas audit internal, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penerapan manajemen risiko secara konsisten pada setiap OPD. Pimpinan OPD diharapkan dapat

membangun budaya organisasi yang berintegritas dengan meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, memperjelas pembagian tugas dan kewenangan, serta memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan secara transparan dan akuntabel.

Bagi Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu disarankan untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit internal melalui peningkatan kompetensi auditor, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit, penerapan audit berbasis risiko (risk-based audit), serta memperkuat mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Audit internal tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan kepatuhan, tetapi juga diarahkan sebagai fungsi konsultatif yang mampu memberikan rekomendasi strategis dalam mencegah terjadinya fraud.

Bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengendalian internal dan manajemen risiko. Setiap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran perlu didasarkan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Bagi pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko secara berkala, menyusun peta risiko (risk register), menetapkan strategi mitigasi, serta melakukan evaluasi terhadap risiko yang muncul dalam setiap program kerja OPD. Dengan penerapan manajemen risiko yang terstruktur, organisasi dapat lebih cepat mendeteksi dan merespons potensi fraud.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi pencegahan fraud, seperti kompetensi aparatur, budaya organisasi, moralitas individu, komitmen organisasi, efektivitas whistleblowing system, kualitas tata kelola pemerintahan (good governance), serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian pada pemerintah daerah lain atau menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM-PLS) untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan fraud.

Daftar Pustaka

- [1] M. Mufidah and M. Masnun, "Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi," *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, vol. 5, no. 2, p. 519, Sep. 2021, doi: 10.33087/ekonomis.v5i2.408.
- [2] L. Lin, "Pengendalian Intern, Pencegahan Fraud, dan Kinerja Perangkat Daerah," *Journal of Sharia Accounting and Tax*, vol. 1, no. 1, pp. 14–22, 2023.
- [3] H. Firmansyah and N. Sinatria, "Peran Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance," *JJA : Jurnal Akuntansi Aisyah*, vol. 6, no. 1, 2025.
- [4] S. Aliyah, I. Rasulong, A. Hasan,) Akuntansi, D. Bisnis, and U. Muhammadiyah Makassar, "Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Mitigasi Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Bpkd Kabupaten Gowa)," *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, vol. 9, no. 2, pp. 2715–4610, 2026, [Online]. Available: <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- [5] A. Fitri and N. Suryadi, "Pengaruh Penegndalian Internal, Audit Internal, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Inspektorat Kabupaten Kampar)," *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, vol. 7, no. 2, 2024.
- [6] Fatmawati, Muhammad Ashari, and Ade Ikhlas Amal Alam, "Pengaruh Auditor Internal, Pengendalian Internal, dan Implementasi Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud," *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, pp. 145–161, Jul. 2024, doi: 10.26487/akrual.v17i2.32835.
- [7] A. Zakaria Seran, A. Casandra Minggu, E. Placida Manek, M. Ratu Rosario Meni, S. A. Melkisedek Ton, and S. P. Baso, "Peran Audit Internal Dalam Mencegah Kecurangan (Fraud) pada Organisasi Pemerintah Daerah," *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, vol. 9, no. 1, p. p-ISSN, 2026.
- [8] B. Anggara and S. S. Ariani, "Studi Efektivitas Audit Internal dalam Upaya Mitigasi Tindakan Fraud di Institusi Pemerintahan," *Jurnal Revenue*, vol. 5, no. 2, 2025, doi: 10.46306/rev.v5i2.
- [9] K. G. Rahman, "Sistem Pengendalian Internal dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan," *Bongaya Journal for Research in Accounting*, vol. 3, no. 1, 2020.

- [10] G. Das Prena and N. Kadek Karina, "Pengaruh Audit dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud: Sebuah Studi Kasus pada Bank Daerah," *Forum Manajemen*, vol. 22, pp. 87–105, 2024, doi: 10.61938/fm.v22i1.
- [11] S. Andini and M. Akib, "Pengaruh Audit Kinerja Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, no. 6, 2026, [Online]. Available: <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi>
- [12] W. O. Meliati, N. Dali, and M. Akib, "Peran Audit Kinerja dalam Memoderasi Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud pada Pemerintah Kota Kendari," *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, no. 7, 2026, [Online]. Available: <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi>
- [13] Suriyadi and F. Azmi, "Pengembangan Manajemen Risiko Pada Instansi Pendidikan," *Universitas Dharmawangsa*, vol. 16, no. 3, pp. 543–553, 2022.
- [14] T. Gloria Pelatta, N. Maelissa, H. Dorothy Titaley, and A. Tuanakotta, "Analisis Risiko Proyek Pembangunan Gedung Auditorium IAIN Kota Ambon," *JOURNAL AGREGATE*, vol. 2, no. 1, p. 2023, 2023.
- [15] D. Melinda, E. Nurhayati, and D. Purnama, "Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal, Proactive Fraud Audit dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BOS," *JRKA*, vol. 9, no. 1, pp. 196–206, 2023.
- [16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi 3)*. Bandung: Alfabeta. 2023.